

## Jokowi Batal ke IKN Bulan Ini untuk Groundbreaking Istana Negara

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur pada bulan Agustus ini. Hal tersebut dikonfirmasi Kepala Sekretarisat Presiden (KSP) Heru Budi Hartono pada Selasa (23/8).

"Kemungkinan awal September (ke IKN). Tidak akhir Agustus. Karena (masih memaksimalkan) persiapan di lapangan," ujar Heru di kompleks Istana Kepresidenan.

Sebelumnya Heru mengatakan, Presiden Jokowi segera mengunjungi IKN untuk groundbreaking istana negara. Hal itu disampaikan pada 17 Agustus lalu.

"Ke IKN jadi, sebelum Agustus selesai. Saya sedang koordinasi dengan Menteri PUPR, Insha Allah kita lihat," ujar Heru di Istana Merdeka.

Di tempat terpisah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono juga mengonfirmasi bahwa Presiden Jokowi belum akan mengunjungi IKN dalam bulan Agustus ini.

"(Sampai akhir bulan

ini) enggak. Saya ditugasi," tutur Basuki di TMII, Selasa (23/8) siang.

Meski demikian, Basuki memastikan proses pembangunan di IKN tetap berlanjut. Pada pekan depan. Ditegaskan bahwa dirinya akan melakukan tanda tangan kontrak untuk pembuatan kapling area kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), land development serta jalan tol.

"Kemudian juga ada air, sebentar lagi ada air. Ini semua sudah beraturan ini sudah akan ditandatangani lima paket," ungkap Basuki.

Menurut Basuki, Presiden Jokowi baru akan meninjau IKN bulan depan atau setelah proses pengerjaan proyek berjalan.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor, mengatakan Presiden Jokowi akan melakukan groundbreaking di. Ia membenarkan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu dijadwalkan datang ke IKN pada pertengahan Agustus ini. Hanya saja, dirinya belum mengetahui pasti tanggal berapa Presiden akan datang. ■ han

FOTO: ANT



### SERAH TERIMA JABATAN KOMANDAN LANUD ISWAHJUDI

Panglima Komando Operasi Udara II Marsda TNI Widayogo Ikoputra (tengah) melakukan salam komando dengan pejabat baru Komandan Lanud Iswahjudi Marsma TNI Irwan Pramuda (kanan) dan pejabat lama Komandan Lanud Iswahjudi Marsma TNI Mochammad Untung Suropati (kiri) sesuai Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Magetan, Jawa Timur, Selasa (23/8). Marsma TNI Irwan Pramuda yang sebelumnya menjabat Komandan Komando Sektor (Dankosek) II kini menjabat Komandan Lanud Iswahjudi menggantikan Marsma TNI Mochammad Untung Suropati yang selanjutnya menjabat Kepala Staf Komando Operasi Udara (Kas Koopsud) III.

## Kolonel Budi Iryanto Pengungkap Kokain Rp1,2 Triliun Meninggal karena Sakit

JAKARTA (IM) - Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Julius Widjono menegaskan bahwa Kolonel Laut (P) Budi Iryanto meninggal dunia karena sakit.

Hal tersebut diutarakan Julius karena sempat beredar isu di masyarakat yang menyebut bahwa Kolonel Budi merengas nyawa terkait penemuan dan penggalangan penyelundupan kokain senilai Rp1,2 triliun beberapa waktu lalu.

"Hal tersebut perlu dijelaskan kepada masyarakat disebabkan beredar rumor bahwa Kolonel Budi Iryanto meninggal dunia karena terkait penemuan dan penggalangan penyelundupan narkoba seberat 179 Kg senilai Rp1,2 triliun, saat dirinya menjabat sebagai Danlanal Banten," kata Julius di Jakarta, Selasa (23/8).

Berdasarkan laporan dari RPSAL dr. Ramelan, kronologi meninggalnya Kolonel Budi Iryanto berawal pada tanggal 4 Agustus 2022 pasien datang ke RPSAL dr. Ramelan dengan keluhan utama lemas.

Setelah diadakan pemeriksaan medis, kata Julius,

kolonel Budi didiagnosa menderita penyakit diabetes mellitus dan selanjutnya dilakukan terapi berupa Transfusi PRC, Infus Albumin, Antibiotik, Diet TKRP, dan Hemodialisa.

"Pada tanggal 18 Agustus 2022 pukul 20.20 WIB, pasien mengalami penurunan kesadaran, kemudian pindah ke ICU," kata Julius.

Selanjutnya pada tanggal (20/8) pukul 06.53 WIB, Julius mengatakan bahwa kondisi pasien menurun dan dilaksanakan tindakan medis secara maksimal, namun pada pukul 08.00 WIB, pasien dinyatakan meninggal oleh dokter.

Berdasarkan data tersebut, Kadispenal berharap rumor yang beredar dapat diluruskan, dan menghormati keluarga almarhum.

Sementara terkait penempatan jabatan dari Danlanal Banten mendapat promosi menjadi Asops Danlantamal XII tak lama pasca kejadian ditemukannya Kokain dan menjabat Sahli Koarmada II saat meninggal dunia, Kadispenal menyampaikan hal tersebut sudah terpolakan dan sesuai prosedur penempatan jabatan di lingkungan TNI AL secara wajar. ■ mei

### PENGUMUMAN

Sehubungan dengan pembubaran PT TARUNA MULTI UTAMA (dalam likuidasi) ["Perseroan"] berdasarkan akta tanggal 26 April 2021 No. 34, dibuat dihadapan MYRA YUWONO, SH, Notaris di Jakarta, dengan ini Likuidator mengumumkan rencana pembayaran kekayaan hasil likuidasi yaitu karena Perseroan tidak mempunyai hutang, maka hasil likuidasi dibagikan kepada para pemegang saham sebagai pengembalian modal mereka. Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Tangerang, 24 Agustus 2022  
Likuidator  
PT TARUNA MULTI UTAMA (dalam Likuidasi)

### PENGUMUMAN

Sehubungan dengan pembubaran PT INDAHJAYA SUKSES ABADI (dalam likuidasi) ["Perseroan"] berdasarkan akta tanggal 29 April 2021 No. 46, dibuat dihadapan MYRA YUWONO, SH, Notaris di Jakarta, dengan ini Likuidator mengumumkan rencana pembayaran kekayaan hasil likuidasi yaitu karena Perseroan tidak mempunyai hutang, maka hasil likuidasi dibagikan kepada para pemegang saham sebagai pengembalian modal mereka. Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Tangerang, 24 Agustus 2022  
Likuidator  
PT INDAHJAYA SUKSES ABADI (dalam Likuidasi)

# 2 Polhukam

FOTO: ANT



## Tim KPK Amankan Sejumlah Dokumen Terkait Suap dari Ruang Rektorat Unila

Rektor Unila diduga telah berhasil mengumpulkan uang suap Rp5 miliar dari para orang tua calon mahasiswa baru yang ikut tes jalur mandiri.

JAKARTA (IM) - Setelah menggeledah ruang rektorat Universitas Lampung (Unila), Senin (22/8) kemarin, tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah dokumen dan barang elektronik yang diduga terkait kasus suap penerimaan mahasiswa baru di Unila.

"Tim penyidik telah selesai melaksanakan upaya paksa penggeledahan di wilayah Lampung. Lokasi dimaksud yaitu Kantor Rektorat Universitas Lampung," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (23/8).

"Ditemukan dan diamankan bukti-bukti antara lain sejumlah dokumen dan barang elektronik yang diduga dapat

mengungkap terkait peran para tersangka," ujarnya.

KPK bakal melakukan proses analisis dan verifikasi terhadap dokumen serta barang elektronik hasil penggeledahan tersebut. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari proses penyitaan.

"Analisis dan penyitaan berbagai bukti tersebut segera dilakukan untuk kebutuhan pemberkasan perkara dari para tersangka," terangnya.

Sebelumnya, penyidik KPK telah menetapkan empat orang tersangka terkait dugaan suap penerimaan calon mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila) tahun 2022. Keempat tersangka tersebut yakni, Karomani (KRM) yang merupakan Rektor Unila.

Kemudian, Heryandi (HY) menjabat Wakil Rektor (Warek) 1 Bidang Akademik Unila, M Basri (MB) meriupakan Ketua Senat Unila, serta pihak swasta bernama Andi Desfiandi (AD).

Karomani, Heryandi, dan Basri, ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan Andi, tersangka pemberi suap.

Karomani diduga memasang tarif Rp100 juta hingga Rp350 juta kalau calon mahasiswa baru diterima kuliah di Unila. Karomani diduga telah berhasil mengumpulkan Rp5 miliar dari tarif yang ditentukan tersebut.

Adapun, uang dugaan suap itu diterima Karomani melalui sejumlah pihak perantara, di antaranya, Heryandi dan M Basri. Salah satu pihak swasta yang menyupai Karomani yakni, Andi Desfiandi.

Atas perbuatannya, Andi selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal

13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan Karomani, Heryandi, dan M Basri, selaku penerima suap disangkakan

RAPAT PARIPURNA DPR Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) berpidato dalam rapat paripurna DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8). Rapat paripurna tersebut beragenda tanggapan Pemerintah terhadap pandangan fraksi atas RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021 dan pandangan umum fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 beserta nota keuangannya.

## Giliran Rombongan Eks Anggota DPRD Tulungagung Diperiksa KPK

JAKARTA (IM) - Kini giliran 12 eks anggota DPRD Tulungagung diperiksa Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap pengalokasian anggaran Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov Jawa Timur (Jatim), Selasa (23/8).

Ke-12 mantan anggota dewan tersebut diperiksa sebagai saksi. Rinciannya, delapan dari mereka merupakan anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019, yaitu: Imam Sapin, H Mashud, Subani Sirab, Widodo Prasetyo, Susilowati, Saiful Anwar, serta Abdulah Ali Munib.

Selain itu, KPK juga memanggil mantan Kepala Bappeda Tulungagung, Suharto. Kemudian, Nurkhodik; merupakan mantan Kabid Pembangunan Pengembangan SDA, Sriyono merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, serta Kasi Perencanaan Teknis dan Evaluasi Jalan Jembatan Dinas PUPR Tulungagung, Wahyudiana.

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Tu-

lungagung, Jalan A Yani Timur Nomor 9 Tulungagung Jawa Timur, atas nama tersebut," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (23/8/2022).

Sebelumnya penyidik KPK telah menetapkan mantan Kepala BPKAD Provinsi Jatim Budi Setiawan (BS) sebagai tersangka. Kepala Bappeda Provinsi Jatim tahun 2017-2018 itu dijerat atas kasus suap pengalokasian anggaran bantuan keuangan Pemprop Jatim.

Dalam kasus ini, Budi Setiawan diduga menerima suap dengan total Rp10,25 miliar. Dugaan penerimaan suap itu terkait alokasi Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Timur untuk infrastruktur tahun 2015-2016, 2017, dan 2018, kepada Kabupaten Tulungagung. Atas perbuatannya, Budi Setiawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. ■ han

## PT Telkom Bantah Penjualan Data 26 Pelanggan IndiHome

JAKARTA (IM) - PT Telkom Indonesia Tbk menegaskan, bahwa 26.730.000 data yang diklaim sebagai data pelanggan Indihome dijual Rp470 ribu tidak valid. Hal itu dipastikan dari hasil investigasi Telkom.

"Faktanya kita sudah melakukan investigasi dari sore dengan tadi pagi juga, pertama, tidak ada record yang mengandung ID Indihome yang valid," ujar SVP Corporate Communication and Investor Relation Telkom Indonesia, Ahmad Reza saat konferensi pers di kawasan Telkom, Senin (22/8).

Informasi tentang kebocoran data pelanggan Indihome mencuat pada Minggu

(21/8). Katanya, data tersebut dijual di forum breached. to. Ada 26.730.000 yang dijual dengan komposisi record browsing history dan data pribadi.

Hasil investasi yang dilakukan, ternyata tidak ada sistem di Telkom yang menyimpan browsing history dan data pribadi secara berdampingan. Selain itu, untuk kepentingan perusahaan maupun layanan pelanggan, Telkom menggunakan email @telkom.net.

"Format @telkom.net ini digunakan telkom sebagai domain atau user ID indihome. Lalu tidak ada sistem di telkom yang menyimpan browsing history dan data pribadi secara berdampingan," ujarnya. ■ mei

FOTO: ANT



### PERTEMUAN NIOHC DI BALI

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono (tengah) didampingi Komandan Pusat Hidro-Oceanografi Angkatan Laut (Pushidroal) Laksamana Madya TNI Nurhidayat (kedua kiri), Asisten Operasi Kasal Laksamana Muda TNI Dadi Hartanto (kiri) dan Panglima Komando Armada II Laksamana Muda TNI T.S.N.B. Hutabarat (kedua kanan) meninjau stan pameran saat pertemuan North Indian Ocean Hydrographic Commission (NIOHC) ke-21 di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (23/8). Pertemuan Komisi Hidrografi Samudera Hindia Utara itu diikuti oleh 16 negara anggota NIOHC untuk membahas sejumlah hal seperti perkembangan yang telah dicapai oleh lembaga hidrografi masing-masing negara.

### PENGUMUMAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK) DAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED GROWTH FUND

Menindaklanjuti rencana perubahan KIK dan Prospektus REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED GROWTH FUND yang telah diumumkan melalui surat kabar harian "International Media" tertanggal 13 Januari 2022, kami, PT Syailendra Capital selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED GROWTH FUND, dengan ini bermaksud menyampaikan pelaksanaan perubahan Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") dan Prospektus REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED GROWTH FUND sebagaimana termaktub dalam akta Addendum REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED GROWTH FUND.

Rincian perubahan ketentuan dalam KIK dan Prospektus tersebut di atas dapat diperoleh di Manajer Investasi.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED GROWTH FUND serta pihak-pihak yang berkepentingan.

SYAILENDRA  
Jakarta, 24 Agustus 2022  
Manajer Investasi  
REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED GROWTH FUND  
PT Syailendra Capital  
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan